

Bab III

Tradisi Lisan sebagai Perlawanan Subversif Perempuan Aceh

Cara lain untuk melihat bagaimana wacana bekerja pada tingkat bahasa adalah dengan melihat tradisi lisan yang dipraktikkan oleh perempuan Aceh. Bidang tradisi lisan menjadi medan pertarungan antara upaya untuk menyingkirkan dan menyertakan perempuan, medan pertarungan antara upaya sejumlah pihak yang berbeda untuk meminggirkan dan memberdayakan perempuan Aceh. Wawancara dengan sejumlah aktivis perempuan Aceh mengungkap bahwa secara historis dan pada saat ini, perempuan Aceh menggunakan tradisi lisan di dalam keluarganya untuk meneruskan informasi dan nilai-nilai kepada anak dan cucu-cucu mereka. Anak dan cucu mereka menerima secara terperinci sejarah Aceh serta pahlawan Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, secara khusus dalam bentuk cerita-cerita, puisi, dan lagu. Hal-hal ini tidak mereka terima dari sekolah ataupun buku pelajaran. Isi dari tradisi lisan telah menjadi suatu medan pertarungan antara pendukung nasionalisme Aceh yang mengubah perempuan menjadi simbol Islam dan aktivis perempuan yang berjuang bagi kesetaraan gender yang berlandaskan pengakuan hak-hak perempuan sebagai hak-hak asasi manusia.

Fachry Ali misalnya, mempromosikan ketidaksetaraan gender di dalam Islam.

Ia mengutip sebuah lagu yang dinyanyikan oleh perempuan Aceh tentang perang kemerdekaan melawan penjajah ketika para perempuan tersebut menimang-nimang bayi dalam pelukannya.

“Do kudaidang Lihatlah layang-layang yang terbang lepasCepat besar sayangkuUntuk membantu perang demi membela negerimuDo KudaidangCepat besar sayangkuMari ber-*jihad* untuk membela agama kita.” (Ali, 1999, h. xviii)

Ali menambahkan dengan yakin bahwa ibu-ibu Aceh hanya menyanyikan lagu itu bagi anak laki-laki, dan tidak melakukannya pada anak-anak perempuan mereka. Meskipun tidak secara langsung merespon karya Ali, dalam bagian awal papernya, Suraiya Kamaruzzaman mengungkapkan kisah yang berbeda seluruhnya mengenai tradisi lisan perempuan Aceh. Menurutnya, ragam cerita, puisi, dan lagu tidak hanya diteruskan oleh ibu-ibu Aceh kepada anak dan cucu laki-lakinya, tetapi juga kepada anak dan cucu-cucu perempuan. Lagu yang dikutip Ali sesungguhnya netral gender. Tidak seperti naskah *Hikayat Perang Sabil* abad ke-19 yang jelas-jelas menyingkirkan perempuan, lagu tadi tidak menggunakan kata ‘anak laki-laki’ untuk melukiskan anak pada umumnya. Malah, ia menggunakan istilah umum “sayangku”, yang merujuk pada anak laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus ini, bias gender tidak tercetak pada naskah, tetapi pada agenda politik yang memperkuat makna dominan yang mencegah perempuan memainkan peran pengambil keputusan. Agenda politik sipenulisnya, karena disitu dengan tegas Ali mengatakan bahwa ibu-ibu Aceh menyanyikan lagi tersebut kepada anak laki-lakinya. Di dalam papernya, Suraiya mengutip puisi kuno yang sampai saat ini masih digunakan ibu-ibu Aceh ketika mereka menina-bobokan anak perempuannya. “Sayangkubibit selada di cerminCepat besar anak perempuankuGantikan ayahmu untuk melawan Belanda”

Jadi meskipun peran perempuan Aceh dalam pengambilan keputusan hilang dari naskah *Hikayat Perang Sabil* abad ke-19 dan mungkin di dalam naskah politik lain yang berlandaskan ajaran Islam selama kebangkitan kepemimpinan politik kaum Ulama, perempuan Aceh menyimpan sejarah pengambilan keputusan mereka tetap hidup lewat tradisi lisan. Strategi perempuan Aceh untuk mensosialisasikan tindak perlawanan, afirmasi diri, bersifat subversif terhadap relasi kekuasaan berlandaskan penafsiran ajaran Islam yang mempromosikan ketidaksetaraan gender yang ada. Strategi perempuan Aceh untuk mensosialisasikan nilai-nilai feminis mereka melalui tradisi lisan oleh Wieringa dimasukkan ke dalam kategori tindakan perlawanan, sebuah pengakuan diri, yang bersifat subversif terhadap hubungan kekuasaan yang ada yang didasarkan pada interpretasi ajaran-ajaran Islam yang mempromosikan ketimpangan gender. Perlawanan ini merupakan proses diskursif yang melawan makna dominan. Ini mengenai perem-

puan yang melawan secara aktif penindasan gender dengan “*subverting representations of gender and of re-creating new representations of gender, of womanhood, of identity and the collective self*– menumbangkan cerminan gender dan membangun kembali cerminan baru tentang keterwakilan gender, keperempuanan, cerminan identitas dan kolektif diri”. (Wieringa, 1995, h. 2, 5) Tentu saja perlu lebih banyak dokumentasi untuk menunjukkan pertarungan makna lewat tradisi lisan. Namun, untuk saat ini buku ini berani berpendapat bahwa dua contoh tradisi lisan di atas merupakan indikator bahwa pertarungan makna lewat tradisi lisan untuk menyertakan perempuan sebagai agendalam konstruksi nasionalisme Aceh harus terus didorong lebih lanjut. Karakter subversif tradisi lisan perempuan Aceh sangat kontras dengan gerakan perempuan Muhammadiyah pada tahun 1910-an. Organisasi perempuan Aisjah memiliki tujuan menyebarkan Islam dan membersihkannya dari unsur-unsur sebelum Islam masuk ke Aceh. Keduabelas aturan yang harus dijalankan oleh perempuan sarat berisi nilai-nilai bahwa perempuan harus memelihara rumah tangga, suami, membuat suaminya bahagia, menuruti perintah suaminya, menjaga badannya dengan baik, tidak dekat-dekat dengan laki-laki yang bukan saudara dekatnya, tinggal di rumah, dan jika keluar dari rumah tidak bersikap seperti seorang perempuan yang tidak tahu ajaran Islam.” (Wieringa, 1995, catatan kaki no. 30, h. 68) Perbandingan ini hanya untuk menggaris bawahi peran agen (pelaku)si (Pelaku aktif) yang dimainkan perempuan Aceh dalam upaya mereka untuk merekonstruksi makna dominan. Sebuah penelitian yang dilakukan bersama oleh AKATIGA (lembaga penelitian di Bandung, Jawa Barat), Yappika (sebuah LSM), dan Forum LSM Aceh (jaringan LSM) mengungkap sejumlah penemuan yang bisa menjadi indikator kemampuan perempuan Aceh untuk meneruskan semangat perlawanan kepada anak dan cucu mereka. Untuk penelitian tersebut mereka mewawancarai 909 responden yang terdiri dari 33% laki-laki dewasa, 20% anak laki-laki, 31,8% perempuan dewasa, dan 14,6% anak perempuan. Mereka dikategorikan ke dalam matriks yang mengelompokkan mereka menurut status mereka sebagai korban atau bukan korban kekerasan langsung, dan menurut tempat tinggal mereka di daerah konflik lama, daerah konflik baru, dan bukan di daerah konflik. Sayangnya, desain penelitian yang cerdas ini menjadi cacat karena kesalahan dalam pemrosesan informasi yang terkumpul.

Penelitian tersebut ditujukan untuk memetakan prioritas kebutuhan orang Aceh dalam konteks perjuangan “kemerdekaan” melawan pemerintah Indonesia saat ini. Hasil dari wawancara ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan topik mereka. Namun ternyata topik-topik sekedar dijadikan satu, tidak dibedakan mana yang merupakan “kebutuhan” dan mana yang merupakan “sarana politik

untuk memenuhi kebutuhan itu”. Dalam konteks perjuangan melawan pemerintah pusat Indonesia dewasa ini, pilihan sarana politik untuk mendapatkan keinginan mereka merupakan suatu variabel yang amat penting. “Rasa aman, damai, dan tertib” yang menempati tempat pertama kebutuhan orang Aceh seharusnya tidak digabung dengan “kemerdekaan”, “otonomi”, “reformasi militer” dan “referendum, yang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Campur aduk antara kebutuhan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebenarnya diakui sebagai masalah oleh para peneliti sendiri (Akatiga et al, 2000, h. 28). Tapi ternyata kesadaran tersebut tidak cukup membuat mereka mengubah cara menganalisa data. Kesalahan mencampur antara kebutuhan dan sarana politik untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat analisa menjadi tidak tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sebagian besar responden hanya ingin mendapatkan “rasa aman, damai, dan tertib” dan “pendidikan” yang lebih baik, dan mereka tidak cukup peduli terhadap solusi politik seperti “kemerdekaan” dari Indonesia, “otonomi” yang diperluas, atau “referendum” untuk mengetahui kehendak masyarakat Aceh.

Tabel 2. Prioritas Keinginan Orang Aceh, tahun 2000

PERINGKAT	JENIS KEBUTUHAN	%
1.	Rasa aman, damai dan tertib	57.0
2.	Pendidikan *	14.6
3.	Ekonomi	6.7
4.	Kemerdekaan *	6.3
5.	Pembangunan Infrastruktur	3.2
6.	Otonomi *	2.9
7.	Reformasi militer, termasuk menarik militer ke luar Aceh *	2.8
8.	Keadilan dan hak asasi manusia	2.1
9.	Agama, termasuk penetapan ajaran-ajaran (moral) Islam	1.2
10.	Referendum*	0.4
11.	Lainnya	2.8

* Sarana politik untuk mencapai kebutuhan (asterisk ditambahkan oleh penulis).

Sumber: Akatiga, Yappika, Forum LSM Aceh, 2000, h. 13.

Tabel 3. Sarana Politik untuk Memenuhi Kebutuhan *

PERINGKAT	SARANA POLITIK	RESPONDEN %			
		Jenis Kelamin		Usia	
		Perempuan	Laki-laki	Dewasa	Anak
1.	Kemerdekaan	6.9	5.9	4.6	9.3
2.	Otonomi	3.1	2.8	3.7	1.5
3.	Reformasi Militer	0.2	0.6	4.1	0.6
4.	Referendum	0.7	4.6	0.7	0.0

* Diformulasi ulang dari Tabel 2.

Ketika data yang terkumpul dikelompokkan kembali berdasar “kebutuhan” dan “solusi politik untuk memenuhi kebutuhan”, penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa kemerdekaan dari Indonesia merupakan prioritas pertama, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3. 6,3% dari seluruh responden memilih kemerdekaan. Otonomi, yang berarti tetap menjadi bagian dari Indonesia tetapi dengan otonomi yang diperluas, berada jauh di belakang di tempat kedua dengan 2,9%. Karena saya tidak punya akses ke data mentah penelitian itu, persentase keempat sarana politik dari analisa data yang pincang tetap dipertahankan. Jika dihitung secara terpisah, persentase responden yang menginginkan “kemerdekaan” sebagai solusi politik akan lebih dari 50%, sementara otonomi hanya dipilih oleh sekitar 23% dari responden.

Yang menarik, Tabel 4 memperlihatkan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia secara tegas. Hanya fraksi kecil perempuan yang menginginkan referendum lebih dulu untuk mengetahui solusi politik apa yang diinginkan orang Aceh. Sementara lebih banyak laki-laki Aceh yang ingin melakukan referendum terlebih dahulu, perempuan Aceh menimbang referendum bukan sebagai solusi politik yang penting. Peran subversif perempuan Aceh dalam melawan penindasan gender dalam Islam lewat tradisi lisan bisa jadi berhasil dalam meneruskan tradisi dan semangat perlawanan dari generasi perempuan yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah anak-anak yang menuntut kemerdekaan sebagai solusi politik dua kali lebih banyak dari jumlah orang dewasa. Ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa tradisi dan semangat perlawanan yang diteruskan oleh pem-

puan kepada anak dan cucu mereka lewat tradisi lisan menunjukkan sejumlah hasil positif. Sebelum memperoleh pemahaman tentang pertimbangan politik menyangkut “otonomi”, “reformasi politik”, dan “referendum” dari media massa, termasuk komunikasi lewat internet, anak-anak Aceh terlebih dahulu menyerap semangat perlawanan yang ditanamkan lewat tradisi lisan. Khususnya ketika keluarga mereka mengalami secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia seperti pembunuhan, penculikan, perkosaan atau penyiksaan terhadap ayah atau anggota keluarga mereka yang lain. Sayang sekali jika laporan penelitian ini tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Jadinya kita tidak bisa membedakan dampak tradisi lisan pada anak laki-laki dan anak perempuan.

Persentase yang tinggi dari perempuan yang memilih kemerdekaan pada penelitian ini mungkin didorong oleh fakta bahwa banyak perempuan telah menderita secara fisik dan psikologis karena kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Banyak perempuan menderita serangan fisik secara langsung seperti pemerkosaan, dan kekerasan tidak langsung dalam bentuk kehilangan suami, kakak, anak, atau sanak saudara. Dapat dipahami bahwa kekerasan politik yang mereka derita telah membuat mereka menggunakan tradisi lisan untuk lebih mensosialisasikan perlawanan mereka kepada anak-anak mereka. Pada gilirannya, semangat perlawanan dan subversif yang diteruskan lewat tradisi lisan membantu menjelaskan persentase yang amat tinggi dari anak-anak Aceh yang memilih kemerdekaan.

Akan tetapi ternyata ada jurang antara tradisi lisan yang mempertarungkan makna pada tingkat bahasa dengan upaya untuk mendekonstruksi makna dominan pada tingkat institusi sosial. Memang lebih banyak perempuan menuntut kemerdekaan politik dari Indonesia, tetapi ketika menyangkut relasi gender di dalam Islam, perempuan Aceh tidak cukup gigih untuk terus melawan domestikasi berlandaskan Islam yang menjadikan mereka sekedar simbol kolektivitas berlandaskan Islam. Landasan politik yang kuat untuk melawan pelecehan perempuan yang tidak mengenakan *jilbab* masih belum muncul. Proses perancangan Peraturan Daerah Mengenai Penerapan *Syariat* Islam di Aceh oleh Gubernur Aceh, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari enam orang laki-laki, juga belum ditentang. Juga belum ada pertarungan yang signifikan menyangkut politik kepemimpinan seksual maskulin yang dilakukan oleh beberapa pemimpin GAM yang memiliki lebih dari satu istri dan memperlakukan istri

mereka dengan buruk. Salah satu alasannya adalah karena aktivis-aktivis perempuan tidak ingin dianggap menentang Islam, khususnya sejak GAM memiliki kemampuan untuk menerapkan kekerasan untuk mempertahankan perempuan sebagai simbol kolektivitas Islam.

Sekarang kita beralih untuk mendiskusikan proses domestikasi perempuan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melihat bagaimana wacana penyingkiran sebenarnya bekerja pada tingkat institusi sosial. Program-program di bawah pemerintahan Sukarno dan lalu Suharto yang diarahkan untuk mendomestikasikan perempuan akan didiskusikan lebih lanjut.